Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran Aplikasi Elsimil sebagai Sistem Informasi Monitoring

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1)

Disusun Oleh :

Kristin Agustini (31402300178)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2025

HALAMAN JUDUL
Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran Aplikasi Elsimil sebagai Sistem Informasi Monitoring

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1)

Disusun Oleh :

Kristin Agustini (31402300178)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SISTEM INFORMASI MONITORING

Disusun Oleh :

Kristin Agustini

NIM : 31402300178

Pembimbing	**Dosen Reviewer**
Drs. Osmad Mutaher, M.Si, Akt,AWP Syariah, CSFT	Ahmad Hijri Alfian, SE., M.Si
NIDN. 0711046401	NIK. 211421032

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperolah

Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D

NIDN. 211403012

HALAMAN PENGESAHAN
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN APLIKASI ELSIMIL SEBAGAI SISTEM INFORMASI MONITORING

Disusun Oleh :

Kristin Agustini

NIM. 31402300178

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ketahap sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnin
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 28 Mei 2025

Pembimbing

Drs. Osmad Muthaher, M.Si., Akt., AWP Syariah., CSFT

NIDN. 0711046401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Kristin Agustini
NIM	: 31402300173
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : "**Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran Aplikasi Elsimil sebagai Sistem Informasi Monitoring"** merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Mei 2025

Yang Membuat

Pernyataan

Kristin Agustini

NIM. 31402300178

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristin Agustini

Nim : 31402300178

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul "**Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran Aplikasi Elsimil sebagai Sistem Informasi Monitoring**" dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Kristin Agustini

NIM. 31402300178

ABSTRACT

This study aims to analyze how accountability and transparency in budget utilization are reflected through the use of the Elsimil application as a monitoring information system in the Stunting Reduction Acceleration Program (PPS) in Cantigi Subdistrict, Indramayu Regency. Elsimil is a digital tool used by Family Assistance Teams (TPK) to carry out assistance and reporting related to stunting-risk families. The research employed a qualitative descriptive method, using in-depth interviews with informants from various parties, including TPK cadres, family planning field officers, and representatives from the relevant government agencies.

The results show that accountability in budget use is reflected in the link between activity reporting in Elsimil and the disbursement of honorarium to cadres, although in practice, some reports do not fully represent actual activities in the field. Meanwhile, transparency is reflected through the digital reporting system which can be accessed by supervisors or government officials, although limited network access and the lack of explanation regarding the disbursement process remain obstacles. Therefore, it can be concluded that although the Elsimil application supports the development of a more open and accountable monitoring system, stronger supervision and better technical understanding are still needed to ensure its optimal implementation.

***Keywords**: Accountability, Transparency, Information System, Elsimil, Stunting*

ABSTRAK

Nama : Kristin Agustini

NIM : 31402300178

Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran Aplikasi Elsimil sebagai Sistem Informasi Monitoring.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran tercermin melalui penggunaan aplikasi Elsimil sebagai sistem informasi monitoring dalam program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Aplikasi Elsimil merupakan alat bantu digital yang digunakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melaksnakan pendampingan serta pelaporan terhadap sasaran keluarga risiko stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada informan dari berbagai pihak, termasuk kader TPK, penyuluh KB, dan perwakilan dinas terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan anggaran tercermin melalui keterkaitan antara pelaporan kegiatan di Elsimil dan pencairan honorarium kader, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan laporan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kegiatan aktual. Sementara itu, transparansi terwujud melalui sistem

pelaporan digital yang dapat diakses oleh atasan atau pihak dinas, meskipun keterbatasan akses jaringan dan kurangnya penjelasan mengenai proses pencairan masih menjadi hambatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun aplikasi Elsimil telah mendukung terciptanya sistem monitoring yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, masih diperlukan penguatan pengawasan dan pemahaman teknis agar sistem ini berjalan optimal.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Informasi, Elsimil, Stunting

INTI SARI

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran tercermin melalui pelaporan digital dalam aplikasi Elsimil di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Aplikasi Elsimil merupakan sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pendampingan kepada sasaran keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam kepada kader, bidan, penyuluh KB, dan perwakilan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tercermin dari ketergantungan pencairan honor terhadap laporan kegiatan yang dilaporkan melalui aplikasi. Namun, kualitas laporan belum sepenuhnya mencerminkan kegiatan lapangan, yang menimbulkan potensi ketidaksesuaian. Transparansi tampak melalui akses pelaporan yang terbuka bagi atasan atau operator tingkat Kecamatan, namun masih terkendala oleh akses jaringan serta kurangnya informasi kepada kader mengenai proses pencairan. Oleh karena itu, perlu adanya

peningkatan kapasitas teknis dan penguatan pengawasan agar akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai secara menyeluruh dalam pelaksanaan program.

Kata Kunci: Elsimil, Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Informasi, Stunting

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : "Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran Aplikasi Elsimil sebagai Sistem Informasi Monitoring" ini dengan baik.

Kegiatan Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna penyelesaian studi Strata Satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan limpahan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, ucapan terimakasih ini penulis berikan teritama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang (FEB UNISSULA).
3. Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi FEB UNISSULA.
4. Bapak Drs. Osmad Mutaher, M.Si, Akt,AWP Syariah, CSFT selaku Dosen Pembimbing.
5. Ahmad Hijri Alfian, SE., M.Si., selaku Dosen Review skripsi.

6. Bapak Fikri (Alm) dan Ibu Taryumi, selaku orang tua yang selalu mendukung dan memberi support sampai dititik ini.
7. Kakak-kakak dan saudara-saudara juga yang selalu memberi dukungan hingga berada dititik ini.
8. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pada diri Sendiri, Kristin Agustini, S.Ak atas keberanian untuk memulai, keteguhan untuk bertahan, ketulusan untuk terus belajar, serta telah percaya bahwa perjalanan ini layak untuk dijalani dan terus melangkah meski terkadang rasa lelah datang menghampiri.

Penulis menyadari karena keterbatasan dan kekurangan, Skripsi ini masih dibutuhkan penyempurnaan untuk mencapai kondisi ideal. Oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dengan kelebihan yang ada.

Semarang, 28 Mei 2025

Penyusun,

Kristin Agustini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
ABSTRACT vii
ABSTRAK vii
INTI SARI x
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Akuntabilitas Pengguna Anggaran 9
2.2 Transparansi Anggaran 12
2.3 Efisiensi dan Value for Money 14
2.4 Sistem Informasi 15

2.5 Aplikasi Elsimil 17
2.6 Technology Acceptence Model (TAM) 17
2.6.1 Pengertian Technology Acceptence Model (TAM) 17
2.6.2 Komponen Technology Acceptence Model (TAM) 18
2.7 Stunting dan Pencegahannya 20
2.7.1 Definisi Stunting 20
2.7.2 Percepatan Penurunan Stunting 21
2.8 Penelitian Terdahulu 23
2.9 Kerangka Pemikiran 27
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1 Jenis Penelitian 29
3.2 Populasi dan Sampel 29
3.3 Sumber dan Jenis Data 30
3.4 Metode Pengumpulan Data 30
3.5 Variabel dan Indikator 30
3.6 Teknik Analisis 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 34
4.2 Deskripsi Variabel 35
4.2.1 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 35
4.2.2 Transparansi Penggunaan Anggaran 36
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 37
4.3.1 Wawancara dengan Kader Tim Pendamping Keluarga 37

4.3.2 Wawancara dengan Pengelola Program oleh Penyuluh KB 42
4.3.3 Wawancara dengan Pihak DISDUK-P3A 44
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 46
4.4.1 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 46
4.4.2 Transparansi Penggunaan Anggaran 47
BAB V PENUTUP 49
5.1 Kesimpulan 49
5.2 Keterbatasan Penelitian 49
5.3 Saran 50
Daftar Pustaka 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 26

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator 32

Tabel 4. 1 Wawancara dengan Bidan Tarsinah 38

Tabel 4. 2 Wawancara dengan Bidan Musyafaah 39

Tabel 4. 3 Wawancara dengan Kader Maesaroh 40

Tabel 4. 4 Wawancara dengan kader Khonaah 41

Tabel 4. 5 Wawancara dengan Ibu Casmirah 42

Tabel 4. 6 Wawancara dengan Bapak Agus 44

Tabel 4. 7 Wawancara dengan Ibu Agung 45

Tabel 4. 8 Pembahasan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 47

Tabel 4. 9 Pembahasan Trasnparansi Penggunaan Anggaran 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab organisasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang dapat diakses, dijelaskan, serta dipertanggungjawabkan kepada publik. Penerapan akuntabilitas yang baik merupakan kunci untuk menjamin efisiensi serta efektivitas pengelolaan anggaran. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka akan semakin baik pula kinerja anggaran yang dikelola oleh instansi tersebut.

Salah satu tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dijalankan dalam setiap aktivitas pemerintahan. Dalam hal ini, organisasi sektor publik tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab kepada atasan (vertikal), tetapi juga kepada masyarakat secara luas (horizontal) sebagai bentuk keterbukaan dan legitimasi publik (Ni & Dwi, 2022).

Transparansi menunjukkan tingkat keterbukaan pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan, di mana publik dan lembaga legislatif dapat mengikuti serta mengawasi prosesnya secara langsung dan jelas. Menurut (Ni & Dwi, 2022) menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam proses perumusan kebijakan, yang memungkinkan masyarakat dan DPRD turut serta memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan. Keterbukaan ini mendorong terwujudnya akuntabilitas horizontal serta mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Transparansi juga mengharuskan adanya informasi yang tersedia secara memadai, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan serta proses pembentukannya. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dapat diakses secara terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan stunting, pemerintah telah melaksanakan berbagai program intervensi gizi, edukasi, dan pemantauan keluarga berisiko stunting. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem informasi digital bernama Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil), yang digunakan monitoring dan mencatat pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting, termasuk dalam pelaksanaan program pencegahan penurunan stunting. Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pihak pelaksana program untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara jujur, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap data pelaksanaan dan keuangan.

Dalam konteks ini, sistem informasi memiliki peran penting untuk mendukung kedua aspek tersebut. Melalui pelaporan digital di aplikasi *Elsimil*, data kegiatan yang dilakukan oleh kader TPK dapat terdokumentasi secara *real-time*, tersimpan dengan rapi, dan dapat ditelusuri oleh pihak atasan atau pemangku

kepentingan lainnya. Ini menjadi salah satu bentuk transformasi dari sistem manual menuju sistem yang mendukung akuntabilitas berbasis teknologi.

Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan beberapa kendala. Di antaranya adalah tidak semua pelaporan mencerminkan kegiatan aktual, serta pencairan honor yang tidak sebanding dengan volume kegiatan yang dilaporkan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK (dr. Desi Fajar Susanti, 2022).

Faktor Risiko Pada Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Jawa Barat diantaranya sumber air minum tidak layak, jamban tidak layak, bukan peserta KB Modern, dan 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu dekat (Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN, 2020). Oleh karena itu diperlukan anggaran yang cukup besar untuk menangani berbagai faktor resiko tersebut, khususnya pada penanganan persoalan stunting. Anggaran yang ditetapkan untuk program-program pelayanan stunting dan program lainya dibahas dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Jawa Barat.

Pada pertemuan tersebut salah satunya membahas Dana Anggaran Khusus (DAK) Sub Bidang KB tahun 2024 dimana dari 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat yang mendapat alokasi DAK Fisik Sub Bidang KB TA 2024 hanya 17 Kabupaten / Kota (*Unmetneed < 14,7%)* dengan total alokasi anggaran Provinsi Jawa barat sebesar Rp. 23,74 Milyar dimana alokasi terbesar yaitu Kabupaten Cirebon dengan Rp. 3.200.000.000,- dan alokasi anggaran terendah yaitu Kota Bandung dengan Rp.42.800.000,- sedangkan alokasi anggaran Kabupaten Indramayu sebesar Rp.350.000.000,-. Dana yang disalurkan untuk PPS merupakan anggaran terbesar dari kegiatan lain, yaitu sebesar Rp.10.091.900.000,- dengan berbagai program dan kegiatan seperti Kegiatan Loka Minikarya (Lokmin), Kampung KB, Pembinaan program oleh kader, dan lain-lain.

Untuk mengatasi masalah stunting ini, pemerintah Indonesia melalui BKKBN telah meluncurkan sebuah aplikasi bernama "Elsimil**"**. merupakan singkatan dari Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil. Aplikasi Elsimil tidak hanya membantu calon pengantin dan pasangan usia subur untuk siap nikah dan hamil, tetapi juga untuk mencegah dan menangani masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Aplikasi Elsimil hadir sebagai salah satu solusi untuk mencegah dan mengatasi stunting di Indonesia yang memberikan informasi akurat dan terpercaya tentang kesiapan menikah dan hamil, serta faktor-faktor risiko stunting.

Aplikasi Elsimil merupakan upaya intervensi pencegahan stunting dengan melakukan skrining kesehatan yang ditindaklanjuti dengan pendampingan kesiapan

pernikahan dan kehamilan kepada sasaran. Rating review aplikasi Elsimil di *Play Store / App Store* tanggal 01 Februari 2023 yaitu 3,2 masih rendah dan banyak keluhan pengguna terkait kesulitan mendaftar, pengoperasian aplikasi, dan seringnya terjadi masalah sistem. Oleh karena itu, pada tahun 2024, dilakukan Upaya analisis penerimaan teknologi dengan metode *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dilakukan terhadap 33 pasangan calon pengantin. Data riset yang diperoleh dianalisis dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional. Data primer diperoleh dari kuesioner tertutup yang mengeksplorasi persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, sikap pengguna, dan minat menggunakan aplikasi Elsimil.

Aplikasi Elsimil yang diluncurkan oleh BKKBN ini berfungsi sebagai sarana monitoring dan pendampingan mulai dari calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan bayi dibawah dua tahun (Baduta) untuk mendeteksi risiko stunting lebih awal, melalui asesmen kondisi kesehatan, gizi, dan kesiapan kehamilan.

Aplikasi Elsimil tidak secara langsung mengelola anggaran, namun data hasil pendampingan yang diinput dalam aplikasi ini berperan penting dalam pengambilan keputusan keuangan, khususnya terkait dengan pencairan honorarium Tim Pendamping Keluarga (TPK). Keberadaan laporan dalam Elsimil menjadi prasyarat pencairan anggaran honor, terlepas dari banyak atau sedikitnya jumlah sasaran yang didampingi dan dilaporkan. Jika kader TPK melakukan pendampingan dan

melaporkan satu sasaran namun tetap menerima honor penuh, maka alokasi anggaran tidak sebanding dengan output yang dihasilkan.

Hal ini berkaitan dengan konsep *Value for Money* pada akuntansi publik, dimana seharusnya pengeluaran pemerintah mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Walaupun disini aplikasi Elsimil membantu dalam proses pengumpulan data, tapi belum tentu menjamin efisiensi penggunaan anggaran, karena belum adanya kontrol terhadap kualitas dan kuantitas output pendampingan. Kondisi ini menimbulkan persoalan penting dalam perspektif akuntansi sektor publik, yaitu berkaitan dengan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pelaporan yang minimal namun tetap bisa melakukan pencairan honor penuh berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam realisasi anggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana implementasi aplikasi Elsimil berkontribusi terhadap sistem akuntabilitas penggunaan dana program stunting.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk memahami persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kemanfaatan aplikasi Elsimil, serta dampaknya terhadap penggunaan aplikasi dalam mendukung proses monitoring dan akuntabilitas program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut peran aplikasi Elsimil sebagai sistem informasi monitoring dalam mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran program percepatan penurunan stunting: Pendekatan TAM di Kabupaten Indramayu.

Pihak penyedia Aplikasi Elsimil seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi dengan benar secara berkala, sehingga program PPS bisa terlaksana sesuai dengan target sasaran.

Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana peran aplikasi Elsimil sebagai sistem informasi monitoring dalam mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran program percepatan penurunan stunting: Pendekatan TAM di Kabupaten Indramayu.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi aplikasi Elsimil sebagai sistem informasi monitoring?
2. Apa hambatan dan tantangan impementasi PPS melalui penggunaan aplikasi *Elsimil* di Kabupaten Indramayu
3. Bagaimana persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan kemanfaatan aplikasi Elsimil berdasarkan pendekatan TAM?

1.1. Tujuan Penelitian

1. Untk mengetahui akuntabilitas dan transparansi aplikasi Elsimil sebagai sistem informasi monitoring.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan penggunaan aplikasi Elsimil.
3. Mengidentifikasi persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan kemanfaatan aplikasi Elsimil berdasarkan pendekatan TAM.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada tim pendamping keluarga terkait aplikasi Elsimil BKKBN khususnya dalam memahami peran sistem informasi monitoring berbasis teknologi dalam mendukung akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran program kesehatan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini bertujuan memberikan masukkan kepada BKKBN dalam optimalisasi penggunaan aplikasi Elsimil sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran program Pencegahan Penurunan Stunting.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas Pengguna Anggaran

Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab organisasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang dapat diakses, dijelaskan, serta dipertanggungjawabkan kepada publik. Penerapan akuntabilitas yang baik merupakan kunci untuk menjamin efisiensi serta efektivitas pengelolaan anggaran. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka akan semakin baik pula kinerja anggaran yang dikelola oleh instansi tersebut.

Salah satu tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dijalankan dalam setiap aktivitas pemerintahan. Dalam hal ini, organisasi sektor publik tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab kepada atasan (vertikal), tetapi juga kepada masyarakat secara luas (horizontal) sebagai bentuk keterbukaan dan legitimasi publik (Ni & Dwi, 2022).

Akuntabilitas Publik adalah bentuk tanggungjawab dari pihak yang diberi mandat atas pelaksanaan tugasnya, yang harus dilaporkan secara terbuka kepada pihak yang memiliki otoritas sebagai pemberi kepercayaan. Menurut Mardiasmo (2018 : 27) yang dikutip oleh (Oci, Wahyudi, & Habib, 2023), terdapat dua bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan atau program kepada atasan atau pihak berwenang di tingkat hierarki lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk tanggung

jawab kepada masyarakat luas sebagai pemilik mandat, sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pencapaian akuntabilitas merupakan salah satu sasaran utama dari reformasi dalam sektor publik. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, para pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak hanya kepada lembaga pengawas atau otoritas tingkat atas, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan publik.

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018), sebagaimana dikutip oleh (Oci, Wahyudi, & Habib, 2023) terdapat empat dimensi utama akuntabilitas sektor publik yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yaitu:

1. Akuntabilitas kebijakan dan hukum (*Accountability for probity and legality*)
    - Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan integritas atau kejujuran dalam menjalankan tugas, terutama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
    - Akuntabilitas hukum menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam pemanfaatan dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*Process accountability*)
    - Mengacu pada penilaian terhadap apakah prosedur dan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah memadai.
    - Hal ini mencakup efektivitas sistem informasi akuntansi, manajemen, serta prosedur administrasi yang diterapkan dalam pelayanan publik, termasuk efisiensi, kecepatan, dan responsivitas.

3. Akuntabilitas program (*Program accountability*)

Berkaitan dengan apakah tujuan dari suatu program telah tercapai dan apakah program tersebut dipilih dari berbagai alternatif yang paling efisien dan efektif.

4. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*)

Merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah atas setiap kebijakan yang diambil, baik kepada lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun kepada masyarakat.

Menurut (Yassir, Mursalim, & Juniad, 2022), istilah akuntabilitas sering diartikan memiliki makna yang sama dengan stewardship yaitu sebagai pertanggungjawaban. Akan tetapi stewardship lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban melaporkan. Teori stewardship berkaitan dengan akuntabilitas yakni teori yang menggambar-kan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Walaupun aplikasi Elsimil membantu dalam proses pengumpulan data, namun belum tentu menjamin efisiensi penggunaan anggaran, karena belum adanya kontrol terhadap kualitas dan kuantitas output pendampingan. Kondisi ini menimbulkan persoalan penting dalam perspektif akuntansi sektor publik, yaitu berkaitan dengan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pelaporan yang minimal namun tetap bisa melakukan pencairan honor penuh berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam realisasi anggaran. Oleh karena itu, penting

untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana implementasi aplikasi Elsimil berkontribusi terhadap sistem akuntabilitas penggunaan dana program stunting.

2.2 Transparansi Anggaran

Transparansi menunjukkan tingkat keterbukaan pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan, di mana publik dan lembaga legislatif dapat mengikuti serta mengawasi prosesnya secara langsung dan jelas. Menurut (Ni & Dwi, 2022) menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam proses perumusan kebijakan, yang memungkinkan masyarakat dan DPRD turut serta memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan. Keterbukaan ini mendorong terwujudnya akuntabilitas horizontal serta mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Transparansi juga mengharuskan adanya informasi yang tersedia secara memadai, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan serta proses pembentukannya. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dapat diakses secara terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut.

Menurut (Yassir, Mursalim, & Juniad, 2022) menjelaskan bahwa transparansi merupakan kondisi ketika publik memiliki akses untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, asas keterbukaan ditekankan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai jalannya

pemerintahan daerah. Hal ini tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak individu, kelompok tertentu, dan informasi yang bersifat rahasia negara.

Selanjutnya, Mahsun dalam Yassir et al. (2022) mengungkapkan bahwa transparansi juga mencakup penyajian informasi keuangan secara terbuka dan dapat dipercaya, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menilai bagaimana pemerintah mengelola dana publik yang dipercayakan kepadanya, serta apakah pelaksanaannya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Transparansi bukan sekadar memberikan akses informasi, melainkan juga menjamin informasi tersebut cukup, relevan, tepat waktu, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengelolaan anggaran daerah. Dengan keterlibatan ini, masyarakat memiliki posisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah terjadinya praktik manipulatif, dan memastikan kebijakan publik menghasilkan manfaat yang adil dan merata.

Dalam perspektif teori stewardship, transparansi anggaran tercermin jika pemerintah menyampaikan pengumuman terkait kebijakan anggaran, menyediakan dokumen anggaran yang mudah diakses, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta membangun sistem penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas.

Dengan demikian, transparansi dapat dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban kebijakan dan anggaran pemerintah.

.

2.3 Efisiensi dan Value for Money

Menurut Mardiasmo (2009:18) yang dikutip oleh (Putri, 2021), *Efficiency* yakni pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien). Berbeda dengan pendapat Magdalena (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan dikatakan efisien apabila penyajian dalam laporan keuangan substansinya sesuai dengan kerangka kerjanya yang meliputi komponen yang singkat, jelas dan menggambarkan keseluruhan kegiatan yang terjadi dalam suatu organisasi. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia ingin melakukan segala sesuatu secara efisien, makna kata efisien disini yakni kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu pekerjaan dikatakan efisien jika hemat tenaga, biaya dan juga waktu.

Konsep *Value for Money* digunakan sebagai pendekatan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal agar pengeluaran atau belanja negara dapat memberikan hasil maksimal. Menurut Nurkholis dan Khusaini (2019), pencapaian value for money dapat dilihat melalui tiga unsur utama yang dikenal sebagai 3E, yaitu:

1. Ekonomi (Input): mengacu pada upaya pemerintah untuk memperoleh sumber daya dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas.
2. Efisiensi (Output): menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan input secara tepat dan tidak boros.
3. Efektivitas (Outcome): berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, kinerja anggaran berbasis value for money akan tercapai jika pemerintah dapat menetapkan pembiayaan yang rendah namun mampu menghasilkan keluaran yang maksimal serta berdampak langsung terhadap hasil atau tujuan dari program yang dijalankan. (Ni & Dwi, 2022)

2.4 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu mekanisme yang dijalankan dalam suatu organisasi yang melibatkan unsur manusia, perangkat teknologi, media, sarana pendukung, prosedur kerja, serta sistem pengendalian. Sistem ini berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi, mengelola transaksi, memberikan umpan balik kepada manajemen mengenai kondisi internal dan eksternal organisasi, serta menyediakan informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan (Fu'adi, Nur Zubaidah, & Juliartha, 2022).

Sebuah studi oleh World Bank (2022) dalam (Dr. Haripin Togap Sinaga, 2025) mencatat bahwa kabupaten/kota yang menerapkan sistem informasi digital terintegrasi memiliki performa program penurunan stunting yang lebih baik, dengan penurunan prevalensi rata-rata sebesar 1,5–2% per tahun, dibandingkan dengan wilayah yang masih menggunakan sistem manual.

(Dr. Haripin Togap Sinaga, 2025) menyatakant tantangan dan Saran Strategis. Meski menjanjikan, transformasi digital lintas sektor menghadapi tantangan kompleks:

1. Fragmentasi sistem: banyak daerah menggunakan platform berbeda yang tidak saling terhubung.
2. Isu interoperabilitas: sulitnya menyatukan data dari sektor yang memiliki standar dan format data yang berbeda.
3. Kekhawatiran privasi dan keamanan data, terutama terkait data kesehatan anak.
4. Kurangnya kapasitas manajerial dan analitik di tingkat daerah

   Untuk itu, kebijakan nasional perlu mendorong:

   1. Standardisasi format data dan arsitektur sistem informasi kesehatan dan gizi.
   2. Pelatihan lintas sektor dalam pemanfaatan dashboard dan data analitik.
   3. Penguatan regulasi keamanan data dan perlindungan privasi.

   Dukungan teknologi digital, program pencegahan stunting dapat bergerak dari pendekatan sektoral yang terpisah-pisah menuju sistem yang kolaboratif, responsif, dan berbasis bukti. Integrasi data lintas sektor bukan hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak yang berisiko mendapatkan intervensi yang tepat pada waktu yang tepat. Transformasi digital dalam tata kelola program stunting adalah kunci menuju perbaikan sistemik dan berkelanjutan.

Pedekatan komunikasi dan system informasi menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan program gizi di Indonesia. Posyandu, kader, tokoh masyarakat, serta kelompok kegiatan merupakan agen perubahan dan garda terdepan dalam pelaksanaan program stunting. Namun, pada perkembangan zaman seperti saat ini melakukan pendekatan komunikasi secara tradisional saja masih dianggap kurang, perlu adanya inovasi digital guna memperluas jangkauan, meningkatkan

efektivitas. Inovasi teknologi digital yang dikembangkan serta dijalankan, memiliki dampak siginifikan dalam mempercepet upaya pencegahan dan penurunan stunting secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kolaborasi digital antara kader, keluarga dan layanan kesehatan merupakan salah satu bentuk inovasi berbasis digital. Contohnya aplikasi yang secara langsung menghubungkan kader TPK dengan keluarga sasaran dan fasilitas Kesehatan adalah Aplikasi *"Elsimil"*.

2.5 Aplikasi Elsimil

Elsimil merupakan singkatan dari Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil. Aplikasi Elsimil tidak hanya membantu calon pengantin dan pasangan usia subur untuk siap nikah dan hamil, tetapi juga untuk mencegah dan menangani masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. (Lutfiya, 2024). Aplikasi Elsimil digunakan untuk mendampingi dan monitoring mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, serta bayi dibawah 2 tahun (Baduta).

Aplikasi Elsimil diintegerasikan dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN sehingga SIGA ini dapat terus diperbaharui apabila kader TPK secara konsisten melakukan pendampingan dan monitoring melalui aplikasi Elsimil.

2.6 Technology Acceptence Model (TAM)

2.6.1 Pengertian Technology Acceptence Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan sebuah kerangka teoritis yang pertama kali dikenalkan oleh Davis dkk. pada (1989) dalam (Aditya Nurul Rohman, 2023). Model ini dikembangkan dari teori sebelumnya, yaitu Theory of Reasoned Action (TRA), yang banyak digunakan dalam kajian psikologi sosial.

TAM secara khusus dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu dalam menerima dan menggunakan teknologi atau sistem informasi.

Model ini menjadi acuan dalam berbagai studi karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi sejauh mana seseorang bersedia menggunakan suatu teknologi baru. Salah satu tujuan utama dari TAM adalah memprediksi penerimaan teknologi oleh pengguna, terutama pada saat teknologi tersebut pertama kali diperkenalkan

2.6.2 Komponen Technology Acceptence Model (TAM)

Model TAM terdiri dari empat komponen utama yang saling berkaitan dalam menjelaskan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem atau aplikasi:

1. ***Perceived Ease of Use*** **(PEOU)**

   Perceived Ease of Use mengacu pada sejauh mana seseorang meyakini bahwa menggunakan suatu teknologi tidak memerlukan banyak usaha. Dalam konteks teknologi informasi, PEOU sering kali digunakan untuk memprediksi niat pengguna dalam memanfaatkan suatu aplikasi atau sistem. Asumsinya adalah, semakin mudah teknologi digunakan, maka semakin besar kemungkinan individu akan menggunakannya. (Aditya Nurul Rohman, 2023)

2. ***Perceived Usefulness*** **(PU)**

   Menurut (Aditya Nurul Rohman, 2023), Perceived Usefulness didefinisikan sebagai tingkat keyakinan pengguna bahwa penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja mereka. Artinya, jika pengguna merasa aplikasi tersebut bermanfaat untuk menyelesaikan

tugas dengan lebih baik atau lebih cepat, maka mereka cenderung menerima dan menggunakannya.

Davis dan Venkatesh menjelaskan beberapa indikator PU, antara lain:

- Useful (berguna)
- Beneficial (memberi manfaat)
- Effectiveness (meningkatkan efektivitas)
- Productivity (meningkatkan produktivitas)

3. Attitude Toward Using

Sikap terhadap penggunaan teknologi (Attitude Toward Using) mencerminkan persepsi pengguna yang terbentuk dari keyakinan mereka terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem. Sikap ini juga bertindak sebagai penghubung antara PEOU dan PU terhadap niat pengguna dalam menggunakan aplikasi.

Sikap ini terdiri dari tiga komponen utama:

- Kognitif (berkaitan dengan pengetahuan)
- Afektif (berkaitan dengan emosi/perasaan)
- Konatif (berkaitan dengan niat atau dorongan bertindak)

Attitude Toward Using adalah perilaku pengguna yang dipengaruhi oleh keyakinan terkuat dalam penggunaan aplikasi online. Dalam hal ini, Attitude Toward Using memiliki hubungan mediasi antara Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness pada Behavioral Intention To Use. Sikap merupakan konstruksi psikologis yang dapat mengarahkan perilaku individu. Sikap terdiri dari unsur-unsur kognitif, emosional,

dan perilaku yang diasumsikan memiliki konsistensi internal satu sama lain dan biasanya terbentuk melalui pengalaman langsung, peniruan, penguatan, dan pembelajaran sosial. Sikap tidak dipahami sebagai keadaan konstan atau kondisi tetap, melainkan konstruksi psikologis variable. Sedangkan menurut Schiffman & Kanuk (2008) pada kajian Pratama dan Bastian (2017) yang dikutip kembali oleh, bahwa indikator attitude toward using adalah antara lain: Komponen Kognitif, Komponen Afektif, Komponen Konasi. (Aditya Nurul Rohman, 2023)

4. ***Behavioural Intention to Use***

   Komponen ini berkaitan dengan sejauh mana pengguna memiliki niat kuat untuk menggunakan suatu teknologi. Behavioural intention dapat dipengaruhi oleh sikap pengguna terhadap teknologi tersebut. Misalnya, ketika seseorang merasa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan, maka keinginan untuk tetap menggunakan bahkan merekomendasikan kepada orang lain pun akan meningkat. (Aditya Nurul Rohman, 2023)

2.7 Stunting dan Pencegahannya

2.7.1 Definisi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan pada balita akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) (Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN, 2020). Sedangkan menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan

panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK (dr. Desi Fajar Susanti, 2022).

Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif serta persaingan sumber daya manusia pada anak dimasa depan. Anak yang mengalami stunting akan memiliki kecerdasan yang rendah, performa akademik buruk, dan produktivitas ekonomi yang rendah saat dewasa. Secara makro, stunting juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan beban pembiayaan kesehatan nasional.

2.7.2 Percepatan Penurunan Stunting

Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%. Wakil Presiden RI sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. (KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI, 2020)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting guna menutup setiap celah potensi risiko yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting, mulai dari fase pra kehamilan, kehamilan dan pasca kehamilan hingga bayi berusia 59 bulan. Kondisi stunting pada anak dipengaruhi oleh faktor ibu seperti aspek antropometri (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas), kadar hemoglobin dan Usia (Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, 2022). Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 102 Tahun 2021 tentang Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu di Kabupaten Indramayu. Pada program ini juga BKKBN mengapresiasi kegiatan pendampingan calon pengantin sebelum menikah, serta mendukung kegiatan-kegiatan untuk menurunkan angka stunting di wilayah pedesaan dengan cara pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita stunting dan kurang gizi, penyaluran bantuan pangan, serta melakukan audit stunting guna mengidentifikasi penyebab terjadinya stunting.

Selain BKKBN, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga melakukan terobosan-terobosan baru guna melaksanakan program ini, diantaranya melakukan inovasi program melalui GESIT (Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu) yang terdiri dari regulasi, pedoman, pembentukan tim dan aplikasi, serta melakukan program OTAAS (Orang Tua Asuh Anak Stunting) yang dilakukan di Tingkat Kecamatan. Peran Pemerintah cukup baik dalam melakukan penurunan angka stunting di Kabupaten Indramayu.

2.8 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian ini
1.	(Ni & Dwi, 2022)	Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Akuntabilitas dan transparansi yang tinggi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja anggaran berkonsep value for money, sehingga anggaran menjadi akuntabel, transparansi, ekonomi, efesien dan efektif	Relevan, karena membahas akuntabilitas, transparansi, dan efisensi anggaran dengan prinsip value for money
2.	(Putri, 2021)	Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi dalam	Kualitatif, Deskriptif	Mekanisme penggunaan DAK Non fisik BOP PAUD sudah transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Mengenai pelaporan dana bantuan, sudah	Relevan, karena membahas akuntabilitas, transparansi, dan efisensi anggaran. Walaupun objek yangditeliti berbeda,

		Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi		transparan kepada guru-guru dan komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orang tua murid.	namun inti pembahasannya sama.
3.	(Desi, Dwi, Sugeng, & Aila, 2023)	Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting di Kota Metro	Observasional	Mayoritas masyarakat telah mendengar tentang aplikasi Elsimil, namun masih banyak yang belum menggunakan atau bahkan mendengar tentang aplikasi ini. Tingkat kepuasan terhadap fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi Elsimil relatif tinggi, namun tingkat efektivitas sosialisasi masih cenderung netral.	Relevansi, karena membahas efektivitas

4.	(Desi, Maritasari, Irianto, Karyus, & Wahyuningsih, 2023)	Evaluasi Efektifitas Elsimil dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dan Penurunan Stunting di Kota Metro	Observasional (Servey, Wawancara, dan Analisis Dokumen)	Mayoritas Masyarakat memiliki pengetahuan tentang program yang di cetuskan BKKBN. Namun, ada Sebagian responden yang belum memahami dan perlu mendapatkan informasi lebih tentang program tersebut.	Relevansi karena membahas efektifitas aplikasi Elsimil bagi pencegahan stunting.
5.	(Erika, 2023)	Gambaran Pengetahuan Calon Pengantin tentang Persiapan Kehamilan di KUA Kecamatan	Kuantitatif (Deskriptif)	Pengetahuan sangat penting sebelum calon pengantin mempersiapkan kehamilan, namun ternyata masih banyak Perempuan yang memiliki pengetahun buruk karena keterbatasan	Relevansi karena membahas penggunaan aplikasi Elsimil bagi pencegahan stunting

		Genuk Kota Semarang		pengetahuan tentang persiapan kehamilan	

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

2.9 Kerangka Pemikiran

Aplikasi Elsimil disini digunakan untuk melakukan monitoring pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan pendampingan baduta yang dilakukan oleh kader TPK, dimana data hasil pendampingan tersebut digunakan untuk dasar pembayaran honorarium kader TPK dan serapan anggaran. Akuntabilitas penggunaan anggaran disini dimaksudkan adanya pertanggungjawaban atas pencairan honorarium TPK dengan prasyarat berupa data hasil pendampingan yang kemudian dilaporkan, namun pelaporan yang minimal namun tetap bisa melakukan pencairan honor penuh berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam realisasi anggaran. Penggunaan aplikasi Elsimil ini dianggap mudah dan membantu kader TPK dalam melakukan pendampingan.

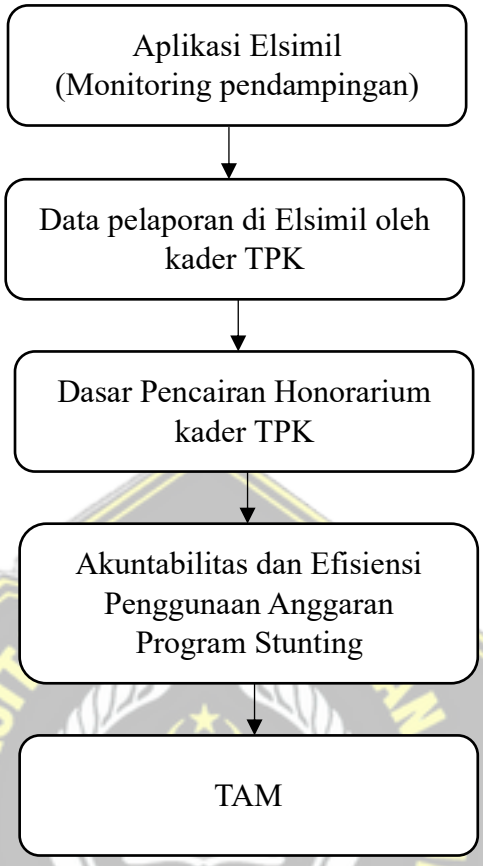

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai instrument penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (studi kasus) pada penelitiannya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari petugas kesehatan, kader KB, Kader PKK, serta pengelola program Pencegahan Penurunan Stunting (PPS) di Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) baik ASN maupun Non ASN, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Sampel dalam penelitian ini adalah 5-10 orang yang dipilih secara acak dari populasi, yaitu dari kader TPK yang terdiri dari petugas kesehatan, kader KB, Kader PKK, pengelola program PPS tingkat Kecamatan yang terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) baik ASN maupun Non ASN, serta bidang KKK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kab. Indramayu.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas kesehatan, kader KB, kader PKK, pengelola program PPS, dan bidang KKK Disduk-P3A.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus, dimana metode studi kasus ini diharapkan dapat membahas objek kasus yang diangkat, peneliti dapat menulis studi kasus terkait pengambilan keputusan, evaluasi, maupun pemecahan masalah. Penggunaan metode studi kasus ini juga diharapkan peneliti untuk mampu perpikir secara kritis serta mengkomunikasikan hasil pemikiran dan penelitiannya dengan baik secara tulisan maupun lisan.

3.5 Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator	Skala	Sumber Data
1.	Perceivved Usefulness (PU)	• Aplikasi Elsimil membentu dalam pemantauan dan pendampingan dalam kasus stunting. • Proses pelaporan dan koordinasi menjadi lebih cepat	Kualitatif Kualitatif	Wawancara Wawancara

1.	Perceived Ease of Use (PEOU)	• Aplikasi mudah digunakan dengan pelatihan teknis. • Penginputan data mudah dan efisien	Kualitatif Kualitatif	Wawancara Wawancara
3.	Attitude Toward Using (ATU)	• Pengguna menilai aplikasi ini penting dan membantu	Kualitatif	Wawancara
4.	Behavioral Intention to Use (BIU)	• Minat mengekplorasi fitur baru	Kualitatif	Wawancara
5.	Actual System Use (ASU)	• Frekuensi Penggunaan Aplikasi per bulan berkisar 1-7 kali • Fitur yang sering digunakan adalah pendampingan ibu hamil, pascapersalinan, dan baduta.	Kualitatif Kualitatif	Observasi / Wawancara Wawancara
6.	Implementasi Penganggaran PPS	• Aplikasi Elsimil membantu mengidentifikasi sasaran prioritas dalam PPS	Kualitatif	Wawancara

		• Koordinasi lintas sektor berbasis data dari hasil pendampingan	Kualitatif	Wawancara / dokuemen

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator

3.6 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini berfokus untuk meneliti dan mendeskripsikan Implementasi Sistem Penganggaran Pencegahan Penurunan Stunting (PPS) melalui Aplikasi "Elsimil" di Kabupaten Indramayu dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptence Model* (TAM).

1. Reduksi Data

Pada penelitian ini Aplikasi Elsimil berperan aktif dalam pengumpulan data hasil pendampingan oleh kader TPK yang kemudian diolah dan diproses secara menyeluruh oleh pengelola program tingkat Kecamatan untuk proses pencairan honor kader TPK. Aplikasi Elsimil ini tentu memiliki tantangan salah satunya perlunya perbaikan system yang mana sudah lama terjadi sehingga saat melakukan pendampingan dilakukan secara manual menggunakan *google form* yang mana berdampak pada hasil akhir yang tidak bisa terintegrasi dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sehingga SIGA tidak bisa secara otomatis mengambil data dari hasil pendampingan.

2. **Penyajian Data**

   Aplikasi Elsimil membantu dalam proses identifikasi sasaran intervensi stunting. Namun, tidak semua kader TPK merasa aplikasi Elsimil ini mudah dioperasikan, beberapa kader merasa kesulitan saat mengoperasikan akibat kendala sinyal, minimnya pelatihan dan kendala yang disebabkan oleh system itu sendiri. Hal ini mempengaruhi persepsi mereka terhadap kemanfaatan aplikasi dan kemudahan aplikasi.

3. **Penarikan Kesimpulan**

   Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Elsimil berperan aktif dalam pengumpulan data hasil pendampingan oleh kader TPK yang kemudian diolah dan diproses secara menyeluruh oleh pengelola program tingkat Kecamatan untuk proses pencairan honor kader TPK. Aplikasi Elsimil ini tentu memiliki tantangan salah satunya perlunya perbaikan system agar aplikasi ini dapat terintegrasi dengan SIGA.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

UPTD P2KB-P3A Kecamatan Cantigi merupakan salah satu unit pelaksana dibawah naungan atau yang berinduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu yang berlokasi di lingkungan kantor Camat Cantigi di Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Disduk-P3A sendiri berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.11, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lokus pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu, yang merupakan salah satu wilayah dalam pelakasanaan program percepatan penurunan stunting. Program ini merupakan program Nasional dan dilaksanakan berbagai sektor termasuk BKKBN yang kemudian didukung oleh pemerintah daerah.

Salah satu upaya yang yang dilakukan adalah dengan meluncurkan aplikasi *Elsimil* yang digunakan oleh Tim Pendamping Keluarga untuk melakukan monitoring dan pendampingan kepada sasaran sebagai dasar pemantauan status kesehatan dan kesiapan calon keluarga.

Walaupun aplikasi *Elsimil* bukan aplikasi anggaran, tetapi aplikasi *Elsimil* ini digunakan sebagai sistem informasi monitoring, dimana data yang dihasilkan dari hasil pendampingan oleh kader TPK digunakan sebagai dasar pencairan honorarium kader TPK serta menjadi bahan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran. Oleh karena itu keakuratan dan kelengkapan data hasil pelaporan menjadi aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan secara primer melalui metode wawancara kualitatif dengan informan yang terlibat langsung yaitu kader TPK, pengelola program, dan perwakilan dari bidang KKK Disduk P3A.

4.2 Deskripsi Variabel

4.2.1 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban yang dilakukan atas kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah dijalankan. Dalam hal ini, aplikasi *Elsimil* digunakan sebagai sistem monitoring hasil pendampingan dan menjadi dasar pencairan honor kader TPK.

Aplikasi Elsimil sebagai sistem pelaporan digital yang memungkinkan kader untuk menginput kegiatan pendampingan secara langsung, lengkap, dan mudah ditelusuri. Jika dilakukan secara manual, maka pelaporan hanya berbentuk fisik yang tidak terpantau langsung oleh atasan, sulit diverifikasi, dan rawan manipulasi data. Dengan aplikasi Elsimil, akuntabilitas dapat terlihat dari:

- Ketepatan waktu pelaporan
- Kesesuaian data dengan SOP
- Hubungan laporan dengan pencairan honor

4.2.2 Transparansi Penggunaan Anggaran

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap data yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Pelaporan melalui aplikasi *Elsimil* menjadi bentuk transparansi digital yang dapat ditelusuri kebenarannya.

Transparansi dalam hal ini mengacu pada aksesibilitas laporan yang telah diinput di aplikasi Elsimil. Dengan menggunakan aplikasi Elsimil,, memungkinkan operator kecamatan dan pihak dinas dapat memantau laporan secara online dan *realtime*, berbeda apabila dilakukan secara manual menjadi sulit dalam mekanisme pelacakkan, verifikasi, dan keterbukaan secara *realtime.* Aplikasi Elsimil memungkinkan data pelaporan tersimpan dalam server, bisa dicek oleh atasan, dan digunakan sebagai dasar pencairan honor, sehingga sistem mendukung pertanggungjawaban dan keterbukaan penggunaan anggaran Indikator transparansi meliputi:

- Dapat dilihat dan diakses mulai dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten
- Menjadi prasyarat dan bukti dukung untuk pencairan honor
- Adanya penjelasan dan progress pelaporan sudah pada taha papa.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Wawancara dengan Kader Tim Pendamping Keluarga

Wawancara dengan Bidan Tarsinah

(Bidan Desa Panyingkiran Kidul)

Rabu, 21 Mei 2025

	Hasil Wawancara
P	Setiap kali mendampingi sasaran keluarga resiko stunting, bagaimana cara Ibu/Bapak melaporkan kegiatan tersebut? Bisa diceritakan prosesnya?
I	Setiap kali pendampingan keluarga resiko stunting dilakukan pencatatan dan pelaporan, dengan data yang dibutuhkan sebagai berikut : • Nama, NIK, Alamat dan data dasar keluarga • Data sasaran meliputi : o Catin : hasil skrining, rekomendasi / kebutuhan dan perkembangan setelah mengikuti pendampingan o Ibu Hamil : hasil pemeriksaan kehamilan, skrining resiko stunting, perkembangan kehamilan o Balita : Berat badan dan tinggi badan Intervensi (pemberian suplemen, edukasi, konseling tentang makanan gizi seimbang) Rujukan layanan Kesehatan yang telah difasilitasi Rekomendasi tindak lanjut
P	Menurut Ibu/Bapak, apakah aplikasi Elsimil mudah digunakan? Apa kendala yang dihadapi selama ini?

I	Menurut saya aplikasi *Elsimil* mudah digunakan, dan tidak ada kendala saat melakukan menginputan data sasaran.
P	Menurut Ibu/Bapak, apa laporan Elsimil sudah cukup terbuka dan jelas bagi semua pihak?
I	Iya, aplikasi *Elsimil* sudah cukup terbuka dan jelas
P	Jika tidak lapor di aplikasi Elsimil, apa yang biasanya terjadi? Honornya tetap cair atau enggak?
I	Jika tidak melakukan pelaporan di aplikasi maka honor nya tidak cair
P	Laporan yang diisi itu, benar-benar sesuai kegiatan di lapangan atau tidak? Atau pernah juga cuma isi sekadarnya saja?
I	Untuk saya pribadi, laporan yang saya berikan dan saya input merupakan laporan yang sebenar-benarnya

Tabel 4. 1 Wawancara dengan Bidan Tarsinah

Wawancara dengan Bidan Musyafaah

(Bidan – Bina Wilayah Desa Cangkring Kec. Cantigi)

Rabu, 21 Mei 2025

	Hasil Wawancara
P	Setiap kali mendampingi sasaran keluarga resiko stunting, bagaimana cara Ibu/Bapak melaporkan kegiatan tersebut? Bisa diceritakan prosesnya?
I	• Identifikasi tinggi badan dan berat badan oleh petugas puskesmas atau kader secara rutin. • Edukasi kepada orang tua tentang stunting, penyebab dan pencegahan, konseling pentingnya gizi seimbang. • Melakukan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit dengan petugas gizi jika sasaran perlu penanganan lebih lanjut.
P	Menurut Ibu/Bapak, apakah aplikasi Elsimil mudah digunakan? Apa kendala yang dihadapi selama ini?
I	Menurut saya aplikasi ini mudah digunakan, namun masih terdapat kendala salah satunya sinyal.
P	Menurut Ibu/Bapak, apa laporan Elsimil sudah cukup terbuka dan jelas bagi semua pihak?
I	Iya, sudah cukup terbuka
P	Jika tidak lapor di aplikasi Elsimil, apa yang biasanya terjadi? Honornya tetap cair atau enggak?
I	Honor TPK tidak cair
P	Laporan yang diisi itu, benar-benar sesuai kegiatan di lapangan atau tidak? Atau pernah juga cuma isi sekadarnya saja?
I	Sesuai dilapangan

Tabel 4. 2 Wawancara dengan Bidan Musyafaah

Wawancara dengan Ibu Maesaroh

(Kader Desa Cantigi Wetan Kec. Cantigi)

Rabu, 21 Mei 2025

	Hasil Wawancara
P	Setiap kali mendampingi sasaran keluarga resiko stunting, bagaimana cara Ibu/Bapak melaporkan kegiatan tersebut? Bisa diceritakan prosesnya?
I	Mendatangi rumah dan bertemu dengan sasaran lalu cek berat badan dan tinggi badan
P	Menurut Ibu/Bapak, apakah aplikasi Elsimil mudah digunakan? Apa kendala yang dihadapi selama ini?
I	Menurut saya aplikasi *Elsimil* mudah digunakan, untuk kendalanya terkadang susah sinyal
P	Menurut Ibu/Bapak, apa laporan Elsimil sudah cukup terbuka dan jelas bagi semua pihak?
I	Iya, aplikasi *Elsimil* sudah cukup terbuka dan jelas
P	Jika tidak lapor di aplikasi Elsimil, apa yang biasanya terjadi? Honornya tetap cair atau enggak?
I	Jika tidak melakukan pelaporan di aplikasi maka honor nya tidak cair
P	Laporan yang diisi itu, benar-benar sesuai kegiatan di lapangan atau tidak? Atau pernah juga cuma isi sekadarnya saja?
I	Laporan yang saya input merupakan hasil dari monitoring di lapangan

Tabel 4. 3 Wawancara dengan Kader Maesaroh

Wawancara dengan Khonaah

(Kader KB Desa Panyingkiran Lor, Kecamatan Cantigi)

Selasa, 13 Mei 2025

	Hasil Wawancara
P	Setiap kali mendampingi sasaran keluarga resiko stunting, bagaimana cara Ibu/Bapak melaporkan kegiatan tersebut? Bisa diceritakan prosesnya?
I	Cara melaporkannya kegiatannya dengan : • Input data melalui Elsimil • Melaporkan bagaimana pertumbuhan anak seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. • Melihat dari pemberian gizi untuk sang anak dari keluarga dan lingkungan sekitar, bagaimana pola asuh terhadap anak juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. • Melaporkan semua hasil pendampingan di Elsimil.
P	Menurut Ibu/Bapak, apakah aplikasi Elsimil mudah digunakan? Apa kendala yang dihadapi selama ini?
I	Menurut saya aplikasi *Elsimil* mudah digunakan, untuk kendalanya terkadang susah sinyal yang mengakibatkan terus kembali ke menu awal, dan kendala lainnya saat ini data sasaran belum lengkap.
P	Menurut Ibu/Bapak, apa laporan Elsimil sudah cukup terbuka dan jelas bagi semua pihak?
I	Iya, aplikasi *Elsimil* sudah cukup terbuka dan jelas
P	Jika tidak lapor di aplikasi Elsimil, apa yang biasanya terjadi? Honornya tetap cair atau enggak?
I	Jika tidak melakukan pelaporan di aplikasi maka honor nya tidak cair
P	Laporan yang diisi itu, benar-benar sesuai kegiatan di lapangan atau tidak? Atau pernah juga cuma isi sekadarnya saja?
I	Laporan yang saya input merupakan hasil dari monitoring di lapangan

Tabel 4. 4 Wawancara dengan kader Khonaah

4.3.2 Wawancara dengan Pengelola Program oleh Penyuluh KB

Wawancara dengan Ibu Casmirah Rahmawati

Teladan KB / PKB Non ASN Desa Cantigi Kulon, Kec. Cantigi

Kamis, 15 Mei 2025

	Hasil Wawancara
P	Menurut Bapak / Ibu apakah data di Elsimil cukup akurat dan dapat dipercaya (dipertanggungjawabkan)?
I	Tidak selalu akurat, karena kader tidak setiap bulan melakukan pendampingan, terkadang hanya mengambil data nya saja dari posyandu.
P	Kendala yang paling sering ditemui dalam proses pelaporan dan pencairan honor?
I	Kendalanya terkadang Masyarakat kurang kooperatif saat memberikan informasi, kalua proses pencairan balik lagi ke dinas
P	Apakah semua laporan yang di input oleh kader bisa dipantau langsung oleh Bapak / Ibu?
I	Semua laporan yang di input kader bisa di akses langsung oleh operator kecamatan, karena data yang diinput digunakan sebagai bukti pelaporan
P	Laporan yang diisi sesuai dengan kegiatan dilapangan atau tidak?
I	Tidak semua sesuai dilapangan, karena ada juga yang tidak melakukan pendampingan lanjutan dan menggunakan perkiraan

Tabel 4. 5 Wawancara dengan Ibu Casmirah

Wawancara dengan Bapak Agus

Penyuluh KB ASN Desa Cemara dan Panyingkiran Kidul, Kec. Cantigi

Kamis, 15 Mei 2025

	Hasil Wawancara
P	Menurut Bapak / Ibu apakah data di Elsimil cukup akurat dan dapat dipercaya (dipertanggungjawabkan)?
I	Tidak benar-benar akurat, masih ada juga kader yang menggunakan batas normal sebagai bahan untuk melakukan pelaporan
P	Kendala yang paling sering ditemui dalam proses pelaporan dan pencairan honor?
I	• Kurang pahamnya pendamping keluarga • Adanya *miss information* terkait perubahan (revisi) dan perubahan dokumen prasyarat mengumpulan SPJ • Saat melakukan pelaporan namun honor belum juga cair sudah mengajukan pertanyaan ke dinas, namun terkait keterlambatan pencairan honorarium TPK Kembali lagi ke bagian keuangan, karena pada dasarnya untuk progres SPJ mulai dari pelaporan sampai pencairan itu dapat dipantau melalui link yang telah disediakan oleh bidang KKK. • Karena untuk pelaporan harus satu Kecamatan dan tidak boleh ada desa yang tertinggal, maka keterlambatan pencairan honor juga bisa terjadi bukan karena keterlambatan pihak dinas untuk mencairkan, terkadang juga terjadi akibat tidak melaporkannya tingkat kecamatan ke dinas, baik itu akibat kendala karena ada kader TPK yang belum input atau kendala lainnya,
P	Apakah semua laporan yang di input oleh kader bisa dipantau langsung oleh Bapak / Ibu?
I	Bisa, kami sebagai operator tingkat Kecamatan bisa memantau langsung hasil pelaporan kader TPK melalui aplikasi Elsimil operator dan link yang disediakan oleh dinas.

P	Laporan yang diisi sesuai dengan kegiatan dilapangan atau tidak?
I	Ada kader yang melakukan sesuai dengan kegiatan dilapangan dan ada juga yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan

Tabel 4. 6 Wawancara dengan Bapak Agus

4.3.3 Wawancara dengan Pihak DISDUK-P3A

Wawancara dengan Ibu Agung

Kepala Bidang KKK Disduk-P3A Kab. Indramayu

Senin, 26 Mei 2025

	Hasil Wawancara
P	Apakah data dari Elsimil digunakan sebagai dasar pencairan honor TPK?
I	Ya, data KRS elsimil menjadi salah satu dasar dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan jasa pendampingan TPK. Namun elsimil bukan semata-mata menjadi satu-satunya dasar pencairan anggaran, hal ini disebabkan aplikasi elsimil memiliki kendala teknis sulit dibuka. Sehingga selain elsimil, data manual pelaksanaan pendampingan KRS pun menjadi dasar pencairan anggaran.
P	Bagaimana peran dinas dalam mengelola atau memantau pelaporan Elsimil dari petugas lapangan?
I	Secara berkala, dinas melalui admin kecamatan elsimil dan kabupaten melakukan monitoring on sistem, apakah entry data yang dilakukan rekan-rekan TPK benar atau belum di isi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penilaian kinerja TPK juga karena aplikasi elsimil merupakan media pelaporan KIE kepada KRS.
P	Bagaimana sistem pengawasan terhadap laporan yang masuk? Apakah ada validasi atau audit internal?
I	Dinas hanya melakukan validasi atas ketepatan proses entry elsimil, namun tidak melakukan audit internal, karena memang ranah pengawasan bukan pada

	satuan kerja biasa, namun pada satuan kerja urusan pengawasan yaitu inspektorat.
P	Bagaimana evaluasi dinas terhadap pelaksanaan pelaporan melalui Elsimil selama ini?
I	Hasil evaluasi pelaksanaan pelaporan elsimil cenderung cukup baik, hal ini disebebkan elsimil memiliki keterbatasan saat mengalami kendala. Karena elsimil di *design* sebagai aplikasi *superapps* dengan dijangkau oleh seluruh TPK se indonesia sehingga terkadang kendala saat digunakan seringkali terjadi seperti blank sistem atau *buffer*.
P	Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran program ini?
I	Tantangan utama yang dihadapi agar tercapai akuntabilitas dan transparansi adalah pemahaman rekan-rekan TPK terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan unsur TPK yaitu kader PKK, Bidan dan PLKB yang mana mereka semua berlatarbelakang ilmu dan kompetensi yang beragam tentunya tantangan bagi kami untuk menjelaskan mengenai akuntabilitas penatausahaan anggaran jasa pendampingan.
P	Kalau Ibu bisa kasih saran ke pembuat sistem atau ke dinas, apa yang paling ingin Ibu perbaiki dari proses laporan dan honor ini?
I	Secara umum, terkait honor jasa pendampingan TPK tidak ada kendala, karena semuan pengganggaran telah sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya mengenai proses laporan khususnya pertanggungjawaban jasa pendampingan, perlu dilakukan *coaching* kepada TPK untuk lebih paham bagaimana pelaporan dan penatausahaan yang baik.

Tabel 4. 7 Wawancara dengan Ibu Agung

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari berbagai latar belakang, mulai dari kader TPK, bidan, penyuluh KB, hingga pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu. Pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana aplikasi Elsimil dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran program Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

4.4.1 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Aspek Akuntabilitas	Pelaksanaan (Temuan Lapangan)	Kesesuaian dengan SOP
Pelaporan kegiatan oleh TPK	Dilakukan melalui aplikasi Elsimil setelah pendampingan, data mencakup identitas sasaran dan intervensi	Sesuai SOP pelaporan Elsimil
Kebenaran isi laporan	Beberapa laporan hanya berasal dari posyandu, bukan hasil pendampingan lanjutan.	Tidak sesuai SOP
Pelaporan sebagai dasar pencairan honor	Honor hanya dicairkan jika ada laporan yang di	Sesuai SOP

	input dan fisiknya diserahkan ke dinas sebagai e*vidence*	
Kualitas laporan	Belum seluruhnya mencerminkan kegiatan nyata, kadang hanya formalitas.	Sebagian besar belum sesuai

Tabel 4. 8 Pembahasan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

4.4.2 Transparansi Penggunaan Anggaran

Aspek Transparansi	**Pelaksanaan (Temuan Lapangan)**	**Kesesuaian dengan SOP**
Akses laporan Elsimil	Melalui link yang disediakan, laporan dapat diakses oleh operator kecamatan dan dinas.	Sesuai harapan
Kejelasan alur pencairan honor	Bersamaan dengan akses link laporan, progress pencairan honor dapat di pantau, namun kader hanya tau info dari penyuluh KB tidak bisa mengakses sendiri karena akses link juga terbatas.	Sesuai

Penjelasan keterlambatan honor	Tidak semua kader diberi informasi ketika honor telat cair	Belum sesuai
Hambatan teknis	Sinyal internet buruk menyebabkan pelaporan terganggu	Menghambat transparansi real-time

Tabel 4. 9 Pembahasan Trasnparansi Penggunaan Anggaran

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penggunaan aplikasi *Elsimil* di Kabupaten Indramayu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aplikasi *Elsimil* telah berperan sebagai sistem informasi monitoring dalam pelaksnaan pelaporan pencegahan penurunan stunting. Pelaporan yang dilakukan oleh kader TPK menjadi bagian proses intervensi terhadap sasaran.
2. Akuntabilitas penggunaan anggaran tercermin melalui pelaporan di *Elsimil*, dimana hasil pelaporannya dijadikan sebagai dasar pencairan honorarium kader TPK. Namun, walaupun dijadikan sebagai dasar pencairan honorarium, kualitas, volume, serta kebenaran laporan tidak sepenuhnya mencerminkan keaktualan, sehingga menimbulkan potensi terjadinya ketidaksesuaian.
3. Transparansi anggaran juga terlihat melalui digitalisasi pelaporan yang memungkinkan diakses langsung oleh atasan. Namun, keterbatasan jaringan akan mengakibatkan proses laporan secara *real-time,* yang berdampak pada keterbukaan informasi secara menyeluruh.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan skripsi, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan memiliki keterbatasn, yaitu :

1. Kurangnya data yang didapatkan, dimana data yang diperoleh hanya berasal dari informan lapangan yaitu kader TPK dan PKB baik ASN maupun NON ASN, karena wawancara dengan pihak Dinas bersifat terbatas dan kurang mendalam, yang disebabkan keterbatasan waktu.
2. Pemahaman terkait aplikasi *Elsimil* berbeda-beda antar Kecamatan, bahkan Desa sekalipun, hal ini terkadang mengakibatkan perbedaan pola piker dan perbedaan paham.

5.3 Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah dan Disduk-P3A

   Perlu adanya penguatan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaporan di aplikasi *Elsimil* agar lebih sesuai dengan yang ada di lapangan, serta menghubungkan antara jumlah laporan dan besaran insentif yang diterima agar lebih akuntabel.
2. Untuk kader TPK

   Disarankan untuk lebih konsisten dan akurat dalam melaksanakan pendampingan melalui aplikasi *Elsimil,* agar pelaporan yang diperoleh adalah kegiatan nyata dan mendukung transparansi anggaran.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya

   Dapat memperluas cakupan wilayah dan menambahkan pendekatan kuantitatif agar memperoleh analisis perbandingan yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

Aditya Nurul Rohman, M. M. (2023). Jurnal-Ekonoi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital. *Penggunaan Technology Acceptance Model Dalam Analisis Actual Use Penggunaan E – Commerce Tokopedia Indonesia*, 2-4.

Desi, S., Dwi, Y. M., Sugeng, E. I., & Aila, K. W. (2023). Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting di Kota Metro. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Metro*, 1-8.

Desi, S., Maritasari, D. Y., Irianto, S. E., Karyus, A., & Wahyuningsih. (2023). *Evaluasi Efektifitas Elsimil dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dan Penurunan Stunting di Kota Metro.*

Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN. (2020). *Orangtua dan Remaja Penting Tahu Stunting - Edukasi Pencegahan Stunting untuk Orangtua dan Remaja.* Jawa Barat.

Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan. (2022, Agustus 26). *Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Retrieved from Kemenkes Ditjen Yankes: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting

dr. Desi Fajar Susanti, M. S.-R. (2022, Agustus 22). *Kemenkes Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan*. Retrieved from Mengenal Apa itu Stunting?: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting

Dr. Haripin Togap Sinaga, M. (2025). Peran Teknologi Digital Dalam Program Pencegahan Stunting. 163-164.

Erika, V. I. (2023). *Gambaran Pengetahuan Calon Pengantin tentang Persiapan Kehamilan di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang.*

Fauzi, & Alfi, M. (2024). *Efektifitas Layanan Klasikal Menggunakan DASHAT untuk Pencegahan Stunting di Desa Kramat Gajah Kabupaten Deli Serdang.* Serdang.

Fu'adi, A., Nur Zubaidah, R., & Juliartha, B. (2022). Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Anak Usia DIni Berbasis Web. *Jurnal EEMISAS*, 2.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI. (2020). *TP2S TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SEKRETARIAN WAKIL PRESIDEN*. Retrieved from https://stunting.go.id/

Lutfiya, I. (2024, July 19). Retrieved from Sudahkan Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah & Hamil) dari BKKBN diketahui oleh Para Catin?: https://unair.ac.id/sudahkan-aplikasi-elsimil-elektronik-siap-nikah-hamil-dari-bkkbn-diketahui-oleh-para-catin/

Ni, P. A., & Dwi, S. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money: Komitmen Organisasi Sebagai

Variabel Moderasi. *Journal of Economics and Business. Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi*, 460.

Oci, Y., Wahyudi, H., & Habib, Z. (2023). Akuntabilitas Pengolaan Dana Desa di Desa Karangpati, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 445-446.

Putri, A. L. (2021). ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL PAUD DI KB NEGERI PELANGI. *Jurnal Ilmu dan RIset Akuntansi*, 4.

Risma, L. (2024). *Implementasi Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) dalam Mengurangi Angka Stunting ditinjau dari Muqasid Syari'ah (Studi Kebijakan BKKBN di Kabupaten Wonogiri)*.

Wahyu. (2025). *Evaluasi Penerapan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) BKKBN*. Surakarta.

YARSI, P. S. (2024, April 18). Retrieved from https://siapnikah.org/mengenal-elsimil-dari-menyiapkan-pernikahan-menjaga-kehamilan-hingga-mencegah-stunting/

Yassir, Mursalim, & Juniad, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME : Journal of Management*, 481-482.